

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah yang sangat penting untuk diatasi oleh Indonesia maupun negara lain, tingkat kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur penilaian bagi sebuah negara, apakah negara itu makmur dan sejahtera atau tidak. Semakin tinggi tingkat kemiskinan maka negara itu dapat dikatakan belum makmur begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat kemiskinan suatu negara maka semakin makmur dan sejahtera negara tersebut. Setiap negara mempunyai cara masing-masing dalam mengatasi masalah kemiskinan di dalam negaranya, begitupun dengan Negara Indonesia. Inilah beberapa kebijakan yang pemerintah ambil dalam mengatasi kemiskinan(Kasriyati, 2012)

Iptek dan Lipi (2015) menjelaskan bahwa kemiskinan juga dapat diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumberdaya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain itu kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang terus dicari solusinya, termasuk kemiskinan di Gorontalo yang mencapai angka

17,76% dimana berdasarkan data BPS 2017 bahwa Provinsi Gorontalo menempati urutan kelima menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi sebuah masalah dimana dapat dikatakan bahwa pemerintah belum mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut secara drastis. Salah satu Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan atau penduduk miskin yang cukup besar yakni Kota Gorontalo. Meskipun pada dasarnya kemiskinan di Kota Gorontalo masuk dalam ranah kemiskinan absolut namun hal ini perlu untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Gorontalo.

Permasalahan mengenai kemiskinan di Kota Gorontalo dapat dilihat dari kemiskinan sebagai berikut ini:

Tabel 1: Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita Penduduk di Kota Gorontalo

No	Tahun	Pendapatan Per Kapita	Kemiskinan
1	2012	11.008.105	5,610%
2	2013	13.757.738	5,990%
3	2014	27.039.553	5,850%
4	2015	29.867.222	6,050%
5	2016	33.084.735	6,050%

Sumber: BPS (Kota Gorontalo Dalam Angka), 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat atau persentase kemiskinan di Kota Gorontalo cenderung naik dimana pada tahun 2012 sebesar 5,610% kemudian naik menjadi 6,050% pada tahun

2016. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan dimana pendapatan perkapita penduduk naik yang dikarenakan adanya peningkatan upah minimum penduduk dan lapangan kerja yang tersedia. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemiskinan di Kota Gorontalo selama 5 tahun terakhir mengalami sentimen yang merupakan gambaran bahwa kurang mampunya Pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut.

Permasalahan kemiskinan tentu ada solusinya, salah satu solusinya yakni dengan peningkatan pendapatan asli daerah atau dalam hal ini dapat dianalogikan sebagai peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan kemandirian daerah maka akan lebih banyak belanja bantuan sosial yang akan mampu diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Menurut Winarna dan Murni (2007), rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap tingkat belanja bantuan sosial pada LKPD. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila PAD makin besar maka tingkat transfer akan menurun namun jumlah pendapatan daerah atau APBD akan seiring mengalami peningkatan, dengan kata lain kemandirian daerah semakin besar maka alokasi untuk belanja bantuan sosial akan semakin meningkat.

Kaitannya dengan kemiskinan sebagaimana diungkapkan oleh Valaris (2012) bahwa *fiscal decentralization effect on poverty evidence american states*. Sehingga dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal atau ditunjukkan dengan kemandirian daerah akan mampu mengurangi

atau mereduksi terjadinya peningkatan pada kemiskinan. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi juga partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan masyarakat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi (kemiskinan mengalami penurunan).

Adanya peningkatan dari pendapatan asli daerah tentu akan membawa dampak yang baik bagi penurunan tingkat kemiskinan. Namun pendapatan asli daerah di Kota Gorontalo belum begitu optimal sebagaimana diketahui bahwa dalam unsur pendapatan daerah lebih dominan transfer dana dari pusat dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai instrumen penting dalam kemandirian daerah dapat dilihat dari data berikut ini:

Tabel 2: Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo

No	Tahun	PAD	Proporsi PAD dalam APBD
1	2012	84.349.037.037	14,335%
2	2013	97.092.318.657	14,377%
3	2014	124.732.780.260	16,522%
4	2015	142.700.996.247	15,998%
5	2016	172.315.775.595	18,171%

Sumber: Situs resmi DJPK, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah Kota Gorontalo terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Namun jika diperhatikan lebih jauh, proporsi pendapatan asli daerah belum begitu baik sebab peningkatannya tidak begitu besar bahkan pada tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini tentunya sangat disayangkan sebab proporsi pendapatan asli daerah yang cenderung naik menandakan bahwa baiknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo.

Selain pendapatan asli daerah, faktor lain yang tidak kalah penting dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Gorontalo yakni pendayagunaan Zakat produktif yang menjadi tanggung jawab dari Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Salah satu Cabang Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yakni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo yang terletak di Jalan Nani Wartabone Kota Gorontalo. Sasaran dari lembaga di Kota Gorontalo untuk pencapaian visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sehingga pada daerah-daerah dapat terkoordinir dengan baik dan zakatnya tepat sasaran.

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (an-namaa), mensucikan

(at-thaharatu) dan berkah (al-barakatu). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin dalam Beik, 2009: 3). Sementara itu, Hafidhuddin dalam Beik, (2009: 3) juga menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60.

Fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian (El-Din dalam Beik, 2009: 4).

Pada kegiatan pengelolaan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo mengalokasikan 17% untuk kegiatan ekonomi dalam hal ini bantuan usaha sebagaimana data tersebut diperoleh dari LKM-RKAT Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo. Permasalahan mengenai pendayagunaan Zakat produktif di Kota Gorontalo dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

Tabel 3: Pendayagunaan Zakat produktif Daerah oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo

No	Tahun	Total Zakat	Zakat Produktif (17%)	Jumlah	Pertumbuhan
1	2012	Rp1.874.000.441	Rp318.580.075	70.624	
2	2013	Rp1.999.054.623	Rp339.839.286	76.739	6,673
3	2014	Rp1.774.149.010	Rp301.605.332	82.113	-11,251
4	2015	Rp1.804.677.885	Rp306.795.240	89.431	1,721
5	2016	Rp1.768.257.002	Rp300.603.690	89.510	-2,018
Rata_Rata		Rp1.844.027.792	Rp313.484.725	Rp81.684	- 1,219

Sumber: Baznas Kota Gorontalo, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah wajib zakat di Kota Gorontalo yang diperoleh dari jumlah penduduk muslim dikali dengan angkatan kerja terus mengalami peningkatan, sehingga dengan hal ini maka tentunya zakat yang berhasil dihimpun juga semestinya harus terus meningkat. Namun kenyataannya bahwa penerimaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo cenderung mengalami fluktuasi atau mengalami kenaikan dan penurunan. Dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan zakat produktif bahwa terjadi penurunan dengan rata-rata sebesar -1,219% dimana penurunan yang terbesar yakni pada tahun 2014. Dari hasil tersebut maka penerimaan tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi penurunan sebesar -2,018% yang diakibatkan oleh adanya penurunan pada zakat dan infaq.

Sehubungan dengan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Pendayagunaan Zakat produktif Terhadap Kemiskinan Di Kota Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Persentase kemiskinan di Kota Gorontalo cenderung naik. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan dimana pendapatan perkapita penduduk naik. Sehingga hal ini menunjukkan kurang mampunya Pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan.
2. Proporsi pendapatan asli daerah kurang stabil yang menunjukkan bahwa kemandirian daerah Kota Gorontalo belum begitu baik yang juga ditandai dengan kecilnya proporsi tersebut
3. Pendayagunaan Zakat produktif di Kota Gorontalo cenderung berfluktuasi atau mengalami kenaikan dan penurunan.

1.3 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang dan identifikasi masalah dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Gorontalo periode 2012-2016?
2. Apakah pendayagunaan Zakat produktif berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Gorontalo periode 2012-2016?
3. Apakah rasio kemandirian daerah dan pendayagunaan Zakat produktif berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Gorontalo periode 2012-2016?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian daerah terhadap Kemiskinan di Kota Gorontalo periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan Zakat produktif terhadap Kemiskinan di Kota Gorontalo periode 2012-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian daerah dan pendayagunaan Zakat produktif terhadap Kemiskinan di Kota Gorontalo periode 2012-2016.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menciptakan dua manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dijabarkan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pengaruh rasio kemandirian daerah dan pendayagunaan Zakat produktif terhadap Kemiskinan di Kota Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Gorontalo dalam mengurangi kemiskinan melalui upaya optimalisasi kinerja keuangan daerah dan melalui optimalisasi penyaluran dana zakat produktif.